

**PENGARUH UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN TERHADAP PEMBERIAN DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL**

Ahkamun Najah¹, Haniah Ilhami²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mencermati praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul dengan membandingkan kondisi sebelum diundangkannya UU Nomor 16 tahun 2019 dengan kondisi setelah diundangkannya UU Nomor 16 tahun 2019, dikaitkan dengan eksistensi Perbup Bantul Nomor 4 tahun 2017 untuk memotret praktik pelaksanaan peraturan tersebut.

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian yuridis-empiris. Data penelitian berupa data primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan para pihak yang terkait. Data penelitian berupa data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan praktik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal khusus di Pengadilan Agama Bantul adalah adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak. Walaupun demikian, penulis menyimpulkan bahwa peraturan ini tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantul terlihat pada ketentuan tambahan sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 tahun 2019.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perkawinan di Bawah Umur, Pengadilan Agama Bantul

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Islam, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

**THE INFLUENCE OF LAW NUMBER 16 OF 2019 CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 1 OF 1974 CONCERNING
MARRIAGE ON THE GRANTING OF MARRIAGE DISPENSATION IN
THE BANTUL RELIGIOUS COURT**

Ahkamun Najah¹, Haniah Ilhami²

ABSTRACT

This study goals is to examine the practice of Marriage Dispensation in Bantul Religious Court by comparing the condition before the enactment of Law No. 16 of 2019 with the condition after the enactment of Law No. 16 of 2019, associated with the existence of Bantul Regent Regulation No. 4 of 2017 to know about the implementation of the regulation.

This research is a combination of legal-empirical research. The primary research data is obtained from field research through interviews with related party. The secondary research data is obtained from library research consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis method is qualitative method.

The results showed that the regulation and practice of Marriage Dispensation in Bantul Religious Court before the enactment of Law No. 16 of 2019 was in accordance with the provisions of Law No. 1 of 1974. The difference between Bantul Religious Court and other court is the existence of Bantul Regent Regulation No. 4 of 2017. However, the author concludes that this regulation is not working well. On the other hand, the influence of Law No. 16 of 2019 on the granting of Marriage Dispensation in Bantul Religious Court can be seen in the additional provisions as stipulated in PERMA No. 5 of 2019

Keyword: Marriage Dispensation, Underage Marriage, Religious Court in Bantul

¹ Student of Islamic Law Department, Faculty of Law, Universtias Gadjah Mada Yogyakarta

² Islamic Law Department Lecturer, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta